

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Teori Umum (*Grand Theory*)

a) Teori Kepentingan

Anwar (2014: 40-41) mengungkapkan bahwa teori kepentingan adalah bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut memperoleh kenikmatan dari negara. Dalam hal ini beban pajak didasarkan pada kepentingan orang-orang termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, sehingga wajar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan ke mereka itu. Yang kaya harus membayar lebih banyak daripada si miskin karena si kaya merasakan lebih banyak kenikmatan. Jadi disini timbangan dasar pajak harus ditentukan sesuai besar kecilnya kepentingan yang diperoleh dari perpajakan negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka semakin besar pula perlindungan negara kepadanya.

b) Teori Gaya Pikul

Anwar (2014: 43) mengungkapkan bahwa esensi justifikasi teori bahwa pemungutan pajak hanya melihat kepada efeknya yang positif untuk kecukupan penerima negara buat membiayai pengeluaran umum negara, dan efek yang baik itulah sebagai dasar keadilannya. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi ke masyarakat, tanpa dikurangi se sen pun, sehingga

pajak ini hanya berfungsi sebagai penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat.

2. Pajak

a) Pengertian Pajak

Akuntansi pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak memegang peranan penting, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan para rakyat (Putri dan Dudi, 2014).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas mengenai pajak tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu: Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, serta pemungutan pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adapun hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

b) Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (www.pajak.go.id, 2019). Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai

alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c) Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak terdapat penggolongan atau pengelompokan pajak seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak, beban pajak dapat dialihkan kepada orang lain atau tidak, tentu kita harus membayar pajak sesuai nominal yang ditentukan, secara umum pengertian pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau

pemerintah. Winerungan (2013) mengungkapkan terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Menurut Golongan diantaranya:
 - a) Pajak Langsung: pajak yang harus ditanggung sendiri tidak bisa dialihkan ke pihak lain.
 - b) Pajak Tidak Langsung: pajak yang bisa dialihkan atau di tanggung oleh pihak lain.
- 2) Menurut Sifat yaitu:
 - a) Pajak Subjektif: pajak yang memperhatikan kondisi dari wajib pajak, artinya membayar pajak dengan sesuai kemampuannya sendiri.
 - b) Pajak Objektif: Pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya saja, misalkan berupa benda, keadaan, dan peristiwa yang menyebabkan bertambahnya hutang.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutan, yaitu :
 - a) Pajak Pusat: Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah yang dilakukn oleh kantor pelayanan pajak (KPP) setempat.
 - b) Pajak Daerah: pajak yang kewewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.

3. Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga

meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Prabowo, 2015). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun taat cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. (Megantara dkk, 2017)

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Putri dan Pratomo, 2014). Berdasarkan yang diatas maka sosialisasi perpajakan dalam lingkungan masyarakat harus dilakukan, agar setiap orang mengetahui mengenai perpajakan baik peraturan, maupun tata cara pelaksanaan melalui metode-metode yang tepat.

a) Indikator Sosialisasi Perpajakan

- 1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- 2) Mengadakan seminar-seminar diberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- 3) Memasang spanduk yang bertemakan pajak mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak.

- 4) Melakukan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- 5) Penyuluhan dan edukasi perpajakan.
- 6) Multimedia dan membuat *web site* DJP *tax center* (Pusat pajak).
- 7) Kegiatan penunjang penyuluhan dan edukasi perpajakan.
- 8) Serta persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak.

4. Sikap Wajib Pajak (X_2)

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson dalam Utomo, 2011). Sikap wajib pajak sangat menentukan tindakan atau keputusan yang diambil oleh wajib pajak baik melalui pelayanan maupun melalui apa yang dirasakan dan dialami oleh wajib pajak (Utami dan Kardinal, 2012).

Berdasarkan dimensi yang diungkapkan di atas pengalaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mempengaruhi sikap dari pelayanan perpajakan yang adil dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan dan kualitas SDM.

a) Indikator Sikap Wajib Pajak

- 1) Pengalaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Kualitas pelayanan petugas pajak dan media massa perpajakan.
- 3) Karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
- 4) Pelayanan perpajakan dapat diukur dengan ketentuan perpajakan.

- 5) Kualitas sistem dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
- 6) Persepsi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

5. Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3)

Sanksi denda adalah untuk menunjukkan pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (Harefa, 2013).

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukuman yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan dimensi yang diungkapkan diatas pelaksanaan sanksi denda apabila memandang dengan sanksi pajak saja akan lebih banyak merugikan, semakin banyak tunggakan yang tersisa maka akan semakin berat pula bagi wajib pajak untuk melunasinya.

a) Indikator pelaksanaan sanksi denda

- 1) Sanksi pidana.
- 2) Sanksi administrasi.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat.
- 4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.

6. Kepatuhan Pajak (Y)

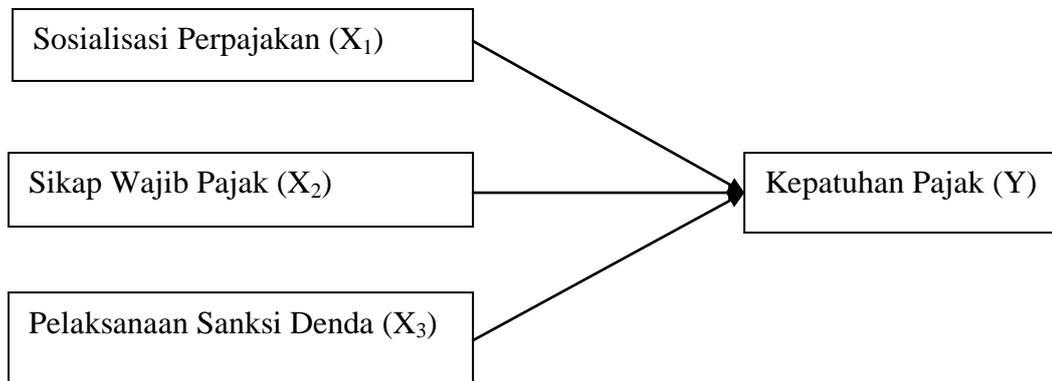
Kepatuhan pajak adalah kewajiban moral individu yang tidak lepas dari kondisi wajib pajak dan kemauan untuk membayar pajak itu sendiri, membayar pajak dapat juga diartikan suatu nilai moral yang rela dikontribusikan oleh seseorang untuk digunakan membiayai pengeluaran umum negara dan tidak mendapatkan jasa timbale balik, menurut (Putri dkk, 2014) Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

Berdasarkan dimensi yang diungkapkan diatas maka dapat dikatakan bahwa setiap wajib pajak harus ikut serta dalam membayar dan melaporkan penghasilan yang telah diperoleh. Dengan adanya pengisian formulir secara benar dan sesuai dengan peraturan, dan adanya pemaksaan.

a) Indikator kepatuhan wajib pajak

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan benar.
- 3) Cara perhitungan pajak dan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak dalam mendaftarkan diri.
- 5) Menyeter kembali, menghitung dan membayar pajak terhutang.
- 6) Serta melakukan perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

B. Bagan Kerangka pemikiran



Gambar II.1
Bagan Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis Penelitian

Atas dasar tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) H_{02a} : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) H_{a2a} : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
- 3) H_{02b} : Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 4) H_{a2b} : Sikap wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 5) H_{02c} : Pelaksanaan Sanksi Denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- 6) H_{a2c} : Pelaksanaan Sanksi Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak

D. Penelitian Sebelumnya

Harefa (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabelnya adalah kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Metode-metode dan alat analisis pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa 0,05 sikap tingkat wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan layanan otoritas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak terhadap perpajakan kesadaran efek positif secara signifikan pada kepatuhan pajak.

Putri dan Dudi (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Variabelnya adalah sosialisasi perpajakan, *help desk*, dan kepatuhan wajib pajak. Metode-metode dan alat analisis pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelayanan khususnya *help desk* perlu dievaluasi kembali.

Prabowo (2015) melakukan penelitian mengenai Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. Variabelnya adalah efektivitas sosialisasi dan surat pemberitahuan. Metode-metode dan alat analisis pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan, dialog interaktif, dan reklame belum membantu KP2KP dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan.

Andriani dan Eva (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabelnya adalah sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode-metode dan alat analisis pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Savitri dan Elva (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Variabelnya adalah sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Metode dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kuantitatif sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental yaitu wajib pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi

linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini diperoleh dari nilai t hitung adalah sebesar 26,664 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena $26,664 > 1,966$ dan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel II.1

Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian

No	Judul, Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Harefa, 2013)	Sama-sama Menggunakan Variabel Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel Pelayanan Fiskus dan Kesadaran
2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan <i>Help Desk</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur) (Putri dan Dudi, 2014)	Sama-sama Meneliti Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Peneliti sekarang tidak menggunakan <i>Help Desk</i>
3	Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano (Prabowo, 2015)	Sama-sama Menggunakan Variabel Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel Efektivitas dan Konsultasi Perpajakan
4	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap	Sama-sama menggunakan variabel Sosialisasi Terhadap Kepatuhan	Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel Pemahaman

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Andrianti dan Eva, 2015)	Wajib Pajak	Perpajakan dan Tingkat Pendidikan
5	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun (Savitri dan Elva, 2017)	Sama-sama mrnggunakan variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Peneliti sekarang menggunakan variabel lain di luar sanksi yaitu sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak

Sumber: Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 12-13), jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian Asosiatif atau Hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Asosiatif. Jenis penelitian ini digunakan penulis karena pembahasan yang akan dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan pajak.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di PT. Pertamina (Persero) MOR II Palembang yang terdaftar di kantor pajak pada tahun terakhir yaitu 348 Wajib Pajak.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2014:116). Sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak pada strata yang ada di dalam populasi karena anggota populasi dianggap homogen. Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = populasi

e = *Margin of Error*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Margin of Error* 10%, sehingga untuk mendapatkan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{348}{1 + 348(0,1)^2}$$

$$n = \frac{348}{4,48}$$

$$n = 77,67 = 78 \text{ sampel}$$

C. Definisi Operasional Variabel (DOV)

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi
Sosialisasi perpajakan (X ₁)	Suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan
Sikap Wajib Pajak (X ₂)	Pernyataan, pertimbangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak
Pelaksanaan sanksi denda (X ₃)	Pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Diukur dengan wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan, serta mengisi formulir pajak dengan benar dan cara perhitungan pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktu

Sumber: Penulis, 2019

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2015: 24), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1) Kuesioner (Angket)

Kuesioner (Angket) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4) Ujian (*Test*)

Ujian (*Test*) adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan langsung untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Menurut Anwar (2009) kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan *skala likert*.

Menurut Sugiyono (2014) *Skala likert* yaitu merupakan sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi dengan

menggunakan skala likert. Peneliti dapat mempelajari dengan mudah setiap perbedaan respon dari setiap responden.

E. Teknik Analisis

Menurut Mudrajad (2014: 124), metode analisis dalam penelitian ada dua (2), yaitu:

1) Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam skala numerik (angka).

2) Metode Kualitatif

Metode Kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik (angka).

Metode yang akan digunakan penulis adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan analisis regresi berganda untuk meyakini bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terkait serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas Teknik Analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*Ordinary Least Square*) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik.

1. Uji Validitas

Uji validitas (*Test Of Validity*) dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak. Hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indeks sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang diukur. Ada tiga jenis validitas instrumen adalah sebagai berikut (Sujarweni , 2015: 106-108):

a) Pengujian Validitas Konstruk

Menyusun pertanyaan yang akan dilakukan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian, kemudian ,melakukan konsultasi kepada para ahli

b) Pengujian Validitas Isi

Instumen yang harus memiliki validitas isi menunjukkan pada sejauh mana instrument tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki .

c) Pengujian Validitas Eksternal

Validitas eksternal menekankan pada aspek bagaimana instrumen yang digunakan sesuai dengan kondisi empiris dilapangan.

Sugiono (2014: 276) menjelaskan bahwa nilai r untuk $N=30$ dengan taraf signifikan 5% adalah 0.361. Jadi apabila r lebih besar dari 0,361 dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai r lebih kecil dari 0,361 dinyatakan valid dan sebaliknya valid dan sebaliknya nilai r lebih kecil dari 0,361 dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas *instrument* menurut Sugiono (2014: 354) uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistic (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih penelitian dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data pecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik-teknik statistik yang digunakan untuk mengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan Software SPSS. Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* 0.6. Dasar keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Cronbach's Alpha > 0.6 Cronbach's Alpha acceptable (construct reliable)*
2. *Cronbach's Alpha < 0.6 Cronbach's Alpha unacceptable (construct unreliable)*

3. Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari (Priyastama, 2017:116):

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Beberapa metode uji normalisasi yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P plot of Regression atau dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov.

a) Metode Grafik

Uji normalisasi residual dengan metode grafik yaitu melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal PP plot of regression standardized residual. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan grafik normal P-P plot of regression standardized residual yaitu:

1. Bila titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut normal.
2. Bila titik-titik menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti garis diagonal maka nilai residu tersebut tidak normal.

b) Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

Metode ini digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam hal ini apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka nilai residual tersebut normal

2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka nilai residual tersebut tidak normal

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan lawannya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai $\text{tolerance} > 0.10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} < 10$. (Priyastama, 2017: 122-123)

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residu pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Priyastama, 2017: 125-128). Model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas. Melihat pola titik pada Scatterplot Dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* dengan cara melihat grafik scatterplot antara *standardized predicted value* dengan *standardized residual*, ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara *standardized predicted value* dengan *standardized residual* yang mana sumbu Y adalah Y uang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y asli). Pengambilan keputusan yaitu:

- a) Bila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Bila tak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$) (Priyastama, 2017: 131). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Metode pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Dasar pengembalian keputusan yaitu:

1. DU & DW & 4-DU maka diterima yang berarti tak terjadi autokorelasi
2. DW & DL atau DW & 4-DL maka ditolak yang berarti terjadi autokorelasi
3. DL & DW & DU atau 4-DU & 4-DL berarti tak ada kesimpulan yang pasti.

5) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi variabel pengganggu atau residul memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengangsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residul berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2013: 160).

4. Uji hipotesis

1) Pengujian Hipotesis secara bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersamaan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B^1 , B^2 , dan B^3 secara bersama-sama memengaruhi Y.

a. Merumuskan hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Sosialisasi perpajak, sikap wajib pajak, pelaksanaan sanksi denda, kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

H_a : Sosialisasi perpajak, sikap wajib pajak, pelaksanaan sanksi denda, kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

b. Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf nyata (α) berarti nilai F tabel, Taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1

c. H_0 ditolak apabila F hitung > F tabel, H_a diterima apabila F di hitung < F tabel

d. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila F hitungan > F tabel H_a diterima F hitung < F tabel.

2) Uji Hipotesis secara Parsial / Individu (Uji t)

Pengujian secara hipotesis secara parsial/individu merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B^1 , B^2 , dan B^3) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual yaitu :

1. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_{02a} : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2a} : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

H_{02b} : Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2b} : Sikap wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{02c} : Pelaksanaan Sanksi Denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2c} : Pelaksanaan Sanksi Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $nk-1$

3. H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t hitungan $<$ t tabel. Berdasarkan probabilitas : H_0 ditolak jika P value $<$ 5% H_0 diterima jika P value $>$ 5%

4. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung \geq t tabel atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel

5. Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2014: 188) menjelaskan bahwa analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel Independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan seterusnya) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

X_1 = Sosialisasi Perpajakan

X_2 = Sikap wajib pajak

X_3 = Pelaksanaan Sanksi Denda

a = Nilai Konstant, perpotongan garis pada sumbu X

$b_1 \dots b_3$ = Koefisien regresi variabel X

e = Error Residual

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation* Region II

a. Sejarah Singkat PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation* Region II

PT. Pertamina (Persero) menjadi perusahaan yang dibutuhkan adanya inovasi yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan perusahaan. PT. Pertamina (Persero) telah melwati beberapa proses sejarah yang panjang dalam perjalananya untuk menjadi perusahaan besar. Berikut sejarah PT. Pertamina (Persero) yang dimulai dari masa kemerdekaan, integritas pengelolaan minyak dan gas (MIGAS), tonggak MIGAS Indonesia, dinamika MIGAS Indonesia dan sampai dengan masa transformasi yang dialami PT Pertamina (Persero).

Pada tahun 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan dengan normal sesuai perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, diantaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera

Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebutan untuk menguasai ladang-ladang tersebut.

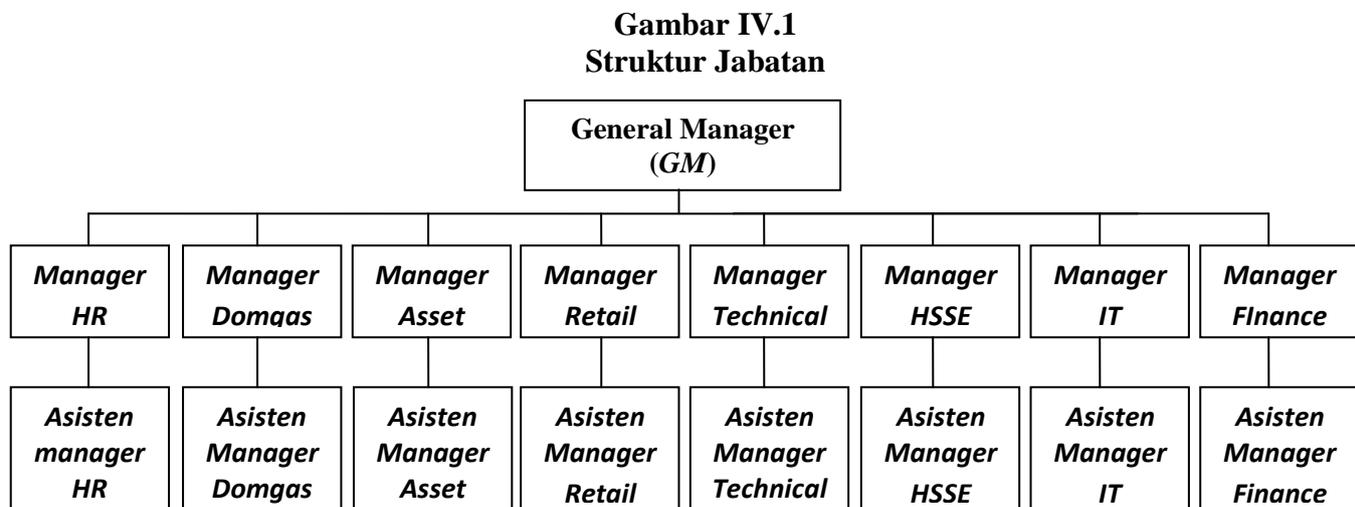
Pada tahun 1960-an, PT. Permina (Persero) distrukturisasi menjadi PN Permina sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas Indonesia adalah negara. Melalui satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan presiden pada 20 Agustus 1968 PN PERTAMIN yang bergerak dibidang guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak Gas Bumi Nasional (Pertamina). Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusaha migas mulai dari mengelolah dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

Pemasaran produk PT. Pertamina (Persero) di Sumatera Selatan dilakukan oleh PT. Pertamina *Marketing Operation Region II* yang memasarkan produk-produk berupa:

- 1) BBM (Bahan Bakar Minyak)
 - a) Minyak tanah,

- b) Premium,
 - c) Minyak solar,
 - d) Minyak diesel, dan
 - e) Minyak bakar.
- 2) BBK (Bahan Bakar Khusus)
- a) Avgas,
 - b) Avtur, dan
 - c) Pertamina.
- 3) NBBM (Non Bahan Bakar Minyak)
- a) Pelumas,
 - b) Elpiji,
 - c) PTA, dan
 - d) Aspal.

**b. Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) Marketing
Operation Region II**



Sumber: PT. Pertamina (Persero)

c. Susunan Jabatan PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II*

1) General Manager (GM)

General Manager memiliki beberapa tugas yang mampu memperlihatkan kepemimpinan dalam perusahaan, misalkan merumuskan beberapa target dan strategi pemasaran di tingkat *region II* sesuai kebijakan *Fuel Retail Marketing*.

2) Manager Human Resources (HR)

Mengkoordinir kegiatan pembinaan perawatan SDM (Sumber Daya Manusia), penelitian dan usul perbaikan norma-norma dan syarat-syarat kerja serta mengadakan material untuk kebutuhan kantor dan rumah tangga.

3) Manager Domgas

Mengkoordinir perencanaan, pengawasan dan kegiatan administrasi pelaksanaan penjualan LPG subsidi dan non subsidi.

4) Manager Asset

Membantu manajemen dalam pengelolaan asset dan mengembangkan perencanaan yang terkait meningkatkan Efektivitas Asset Manajemen Unit mengembangkan strategi yang efektif dan efisien asset yang dikelolanya.

5) Manager Retail

Mengkoordinir perencanaan pengawasan pelaksanaan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi dan non subsidi di wilayah *Marketing Operation Region II*.

6) Manager *Technical*

Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan baru dan pemelihara distribusi dan pemasaran di PT. Pertamina (Persero) MOR II.

7) Manager HSSE

Menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, evaluasi, penyuluhan dalam bidang pencemaran lingkungan kerja, dan evaluasi sarana fasilitas di terminal BBM, Depot LPG, dan DPPU yang berkaitan dengan HSSE.

8) Manager IT

Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk *hardware* dan *software*, peralatan termasuk printer, scanner, tinta dan lain-lain.

9) Manager *Finance*

Menyelenggarakan penyusunan dan pengawasan pemakaian anggaran perusahaan, kegiatan perbendaharaan, kegiatan akuntansi dan pengendalian keuangan PT. Pertamina (Persero) MOR II.

d. Visi dan Misi

1) Visi

“Menjadikan Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. Untuk mewujudkan Visi Perseroan sebagai perusahaan kelas dunia, maka

perseroan sebagai perusahaan milik negara (100% saham dimiliki negara) turut melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri.

2) Misi

“Menjalankan usaha minyak gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegritas, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat”. Misi perseroan menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi serta niaga energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*) secara terintegritasi.

2. Gambaran Umum Responden Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui penyebaran/pembagian kuesioner yang dilakukan di PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang yang respondennya adalah pegawai dalam lingkungan PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang. Populasi/jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 78 orang. Adapun jumlah sampelnya dapat dilihat pada tabel IV.1:

Tabel IV.1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah kuisisioner yang tersebar	78	100%
2	Jumlah kuisisioner yang dapat diolah	50	64%

Sumber: Data Diolah, 2019

Karakteristik dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-Laki	44	88%
	Perempuan	6	12%
	Jumlah	50	100%
Usia	<25 Tahun	3	6%
	25-45 Tahun	42	84%
	45 Tahun	5	10%
	Jumlah	50	100%
Tingkat	SMA	12	24%
	D3	18	36%
	S1	20	40%
	S2	0	0%
	S3	0	0%
	Jumlah	50	100%
Lama Bekerja	<3 Tahun	13	26%
	3-5 Tahun	13	26%
	5-10 Tahun	15	30%
	>10 Tahun	9	18%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi penelitian ini dengan jumlah 44 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan dalam

penelitian ini berjumlah 6 orang. Dilihat dari segi umur responden beragam, usia > 25 tahun sebanyak 3 orang, usia 25 – 45 tahun sebanyak 42 orang, dan usia > 45 tahun sebanyak 5 orang. Dilihat dari segi tingkat pendidikan akhir, responden yang lulus SMA sebanyak 12 Orang, responden yang lulus Diploma 3 sebanyak 18 Orang, responden yang lulus Strata 1 sebanyak 20 Orang, responden yang lulus Strata 2 dan responden yang lulus Strata 3 tidak ada. Serta dilihat dari lama berkerja, responden yang bekerja > 3 tahun sebanyak 13 orang, responden yang bekerja 3-5 tahun sebanyak 13 orang, responden yang bekerja 5-10 tahun sebanyak 15 orang, dan responden yang bekerja > 10 tahun sebanyak 9 orang.

B. Hasil Pengolahan Data

1. Uji Data

a. Uji Validitas

1) Validitas Sosialisasi Perpajakan

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data yang dalam penelitian ini data tersebut berupa kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Dimana suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya di bawah 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel X_1 Sosialisasi Perpajakan dapat dilihat dari tabel IV.3:

Tabel IV.3
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,291	0,703	Valid
P2	0,291	0,739	Valid
P3	0,291	0,590	Valid
P4	0,291	0,669	Valid
P5	0,291	0,761	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan dijelaskan sebagai berikut: $N-K-Y = 50-3-1 = 46$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 46 adalah 0,291. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} di atas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

2) Validitas Sikap Wajib Pajak

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data yang dalam penelitian ini data tersebut berupa kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Dimana suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya di bawah 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel X_2 Sikap Wajib Pajak dapat dilihat dari tabel IV.4:

Tabel IV.4
Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,291	0,743	Valid
P2	0,291	0,574	Valid
P3	0,291	0,654	Valid
P4	0,291	0,594	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan dijelaskan sebagai berikut: $N-K-Y = 50-3-1 = 46$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 46 adalah 0,291. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} di atas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Sikap Wajib Pajak (X_2) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

3) Validitas Pelaksanaan Sanksi Denda

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data yang dalam penelitian ini data tersebut berupa kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Dimana suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya di bawah 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel X_3 Pelaksanaan Sanksi Denda dapat dilihat dari tabel IV.5:

Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Sanksi Denda

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,291	0,649	Valid
P2	0,291	0,697	Valid
P3	0,291	0,776	Valid
P4	0,291	0,742	Valid
P5	0,291	0,819	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r_{tabel} dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan dijelaskan sebagai berikut: $N-K-Y = 50-3-1 = 46$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 46 adalah 0,291. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} di atas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4) Validitas Kepatuhan Pajak

Uji validitas data dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data yang dalam penelitian ini data tersebut berupa kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Dimana suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya di bawah 0,05 maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas variabel Y Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari tabel IV.6:

Tabel IV.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,291	0,678	Valid
P2	0,291	0,739	Valid
P3	0,291	0,778	Valid
P4	0,291	0,833	Valid
P5	0,291	0,875	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan dijelaskan sebagai berikut: $N-K-Y = 50-3-1 = 46$. DF (Distribusi frekuensi) r_{tabel} 46 adalah 0,291. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} di atas nilai r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kepatuhan Pajak (Y) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Uji Reabilitas

1) Reabilitas Sosialisasi Perpajakan

Pengujian reabilitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat reabilitas konsisten instrumen penelitian. Dimana sebuah data dinyatakan reliabel atau handal jika *Cronbach's Alpha* atau koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Apabila koefisien alpha $> 0,60$ maka data penelitian dianggap sangat baik dan mempunyai keandalan yang tinggi untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Sebaliknya, apabila koefisien alpha $< 0,60$, maka data penelitian

tidak mempunyai keandalan yang tinggi untuk diujikan dalam penelitian. Adapun hasil uji reabilitas variabel X_1 Sosialisasi Perpajakan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Reabilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.726	5

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.7 di atas, *Aplha* menunjukkan pada angka sebesar 0,726, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,726 > 0,291$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,726 menunjukkan bahwa alat instrumen yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

2) Reabilitas Sikap Wajib Pajak

Pengujian reabilitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat reabilitas konsisten instrumen penelitian. Dimana sebuah data dinyatakan reliabel atau handal jika *Cronbach's Alpha* atau koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Apabila koefisien alpha $> 0,60$ maka data penelitian dianggap sangat baik dan mempunyai keandalan yang tinggi untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Sebaliknya, apabila koefisien alpha $< 0,60$, maka data penelitian tidak mempunyai keandalan yang tinggi untuk diujikan dalam

penelitian. Adapun hasil uji reabilitas variabel X₂ Sikap Wajib Pajak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji Reabilitas Sikap Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.527	4

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.8 di atas, *Aplha* menunjukkan pada angka sebesar 0,527, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,527 > 0,291$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,527 menunjukkan bahwa alat instrumen yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

3) Reabilitas Pelaksanaan Sanksi Denda

Pengujian reabilitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat reabilitas konsisten instrumen penelitian. Dimana sebuah data dinyatakan reliabel atau handal jika *Cronbach's Alpha* atau koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Apabila koefisien alpha $> 0,60$ maka data penelitian dianggap sangat baik dan mempunyai keandalan yang tinggi untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Sebaliknya, apabila koefisien alpha $< 0,60$, maka data penelitian tidak mempunyai keandalan yang tinggi untuk diujikan dalam

penelitian. Adapun hasil uji reabilitas variabel X₃ Pelaksanaan Sanksi Denda dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji Reabilitas Pelaksanaan Sanksi Denda

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.787	5

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.9 di atas, *Aplha* menunjukkan pada angka sebesar 0,787, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,787 > 0,291$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,787 menunjukkan bahwa alat instrumen yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

4) Reabilitas Kepatuhan Pajak

Pengujian reabilitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat reabilitas konsisten instrumen penelitian. Dimana sebuah data dinyatakan reliabel atau handal jika *Cronbach's Alpha* atau koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Apabila koefisien alpha $> 0,60$ maka data penelitian dianggap sangat baik dan mempunyai keandalan yang tinggi untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data. Sebaliknya, apabila koefisien alpha $< 0,60$, maka data penelitian tidak mempunyai keandalan yang tinggi untuk diujikan dalam

penelitian. Adapun hasil uji reabilitas variabel Y Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.10 di atas, *Aplha* menunjukkan pada angka sebesar 0,836, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,836 > 0,291$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interpretasi korelasi angka 0,836 menunjukkan bahwa alat instrumen yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat sebaran data hasil penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas distribusi data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara membandingkan nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan nilai $\alpha = 0,05$. Jika *Asymptotic Significance* $> \alpha = 0,05$, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Penelitian ini dibantu menggunakan *software* SPSS dengan hasil dapat dilihat pada tabel IV.11:

Tabel IV.11
Hasil Pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

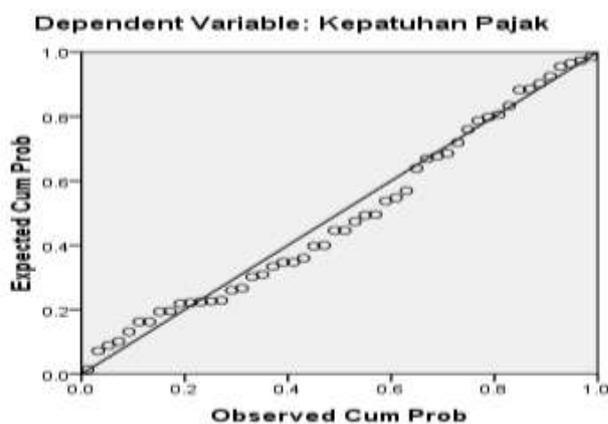
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36641671
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.559
Asymp. Sig. (2-tailed)		.914

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculate from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel IV.11 di atas, pada kolom *Asymptotic Significance* dua sisi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) untuk semua variabel yaitu 0,914 yang berarti angka tersebut di atas $\alpha = 0,05$. Maka fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga bisa dilihat dari bentuk grafik normal *P-P Plot* seperti gambar di bawah ini:

Gambar IV.12
Hasil Uji Normalitas P-P Plot
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



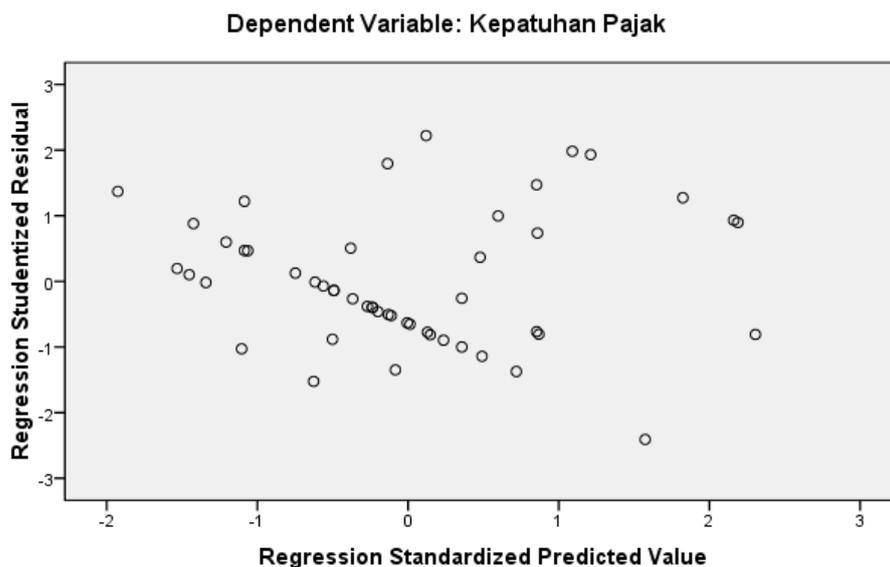
Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan gambar IV.2 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar IV.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan gambar IV.3 di atas maka dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II Palembang*.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW-Test)*. Jika nilai *DW-Test* lebih besar dari batas atas (*dU*), maka tidak terjadi autokorelasi. Angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah *dL* (angka yang diperoleh dari tabel DW batas bawah), *dU* (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas), $4-dL$ dan $4-dU$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-). Dengan penggunaan *software* SPSS, hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.14
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.718 ^a	.516	.484	1.369	1.969

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Sanksi Denda, Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.12 di atas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) pada penelitian ini sebesar 1,969 berarti nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian jika dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada tingkat kepercayaan 5%, jumlah sampel (N) sebanyak 50 dan jumlah variabel dependen (K) sebanyak 3 variabel, variabel independen sebanyak 1 variabel sehingga $(50-3-1=46)$ maka diperoleh *durbin-watson Low* (*dL*) 1,3912 dan *durbin-watson Up* (*dU*) 1,6677, serta *DW-test* sebesar 1,969. Berarti $DW-test > dU$, maka tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF di bawah 10,00 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *software* SPSS dapat dilihat pada tabel IV.13:

Tabel IV.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.534	.489		3.137	.003		
Sosialisasi Perpajakan	-.017	.106	-.018	-.160	.873	.761	1.315
Sikap Wajib Pajak	.183	.101	.219	1.815	.076	.670	1.492
Pelaksanaan Sanksi Denda	.524	.097	.619	5.429	.000	.752	1.331

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil tabel IV.13 di atas, nilai *tolerance* untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda lebih besar atau di atas dari 0,10, sehingga berarti tidak terjadi multikolinearitas dan nilai VIF untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda lebih kecil atau di bawah dari 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas.

5) Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah berhubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat persamaan regresi hubungan Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sikap Wajib Pajak (X_2), dan Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3)

secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Berikut ini hasil dari pengujian regresi linier berganda:

Tabel IV.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.534	.489		3.137	.003
Sosialisasi Perpajakan	-.017	.106	-.018	-.160	.873
Sikap Wajib Pajak	.183	.101	.219	1.815	.076
Pelaksanaan Sanksi Denda	.524	.097	.619	5.429	.000

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.14 di atas, konstanta untuk persamaan regresi bernilai 1,534 dan nilai koefisien regresinya adalah -0.017 untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), sebesar 0,183 untuk variabel Sikap Wajib Pajak (X_2), dan sebesar 0,524 untuk variabel Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3). Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,534 - 0,017X_1 + 0,183X_2 + 0,524X_3 + e$$

Persamaan di atas berarti bahwa, konstanta sebesar 1,534 dengan parameter positif, maka hasil dari kepatuhan perpajakan dapat dipertahankan. Berdasarkan uji regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa:

a) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Pajak Y

Nilai koefisien Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) adalah sebesar -0,017 atau -1,7%. Berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) memiliki pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak (Y) yaitu sebesar 1,7%. Artinya jika ada kenaikan Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,7%. Begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,7%. Semakin menurun tingkat Sosialisasi Perpajakan, maka semakin meningkat Kepatuhan Pajak.

b) Pengaruh Sikap Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak Y

Nilai koefisien Sikap Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) adalah sebesar 0,183 atau 18,3%. Berarti bahwa Sikap Wajib Pajak (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y) yaitu sebesar 18,3%. Artinya jika ada penurunan Sikap Wajib Pajak (X_2) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,3%. Begitu juga sebaliknya, jika ada kenaikan Sikap Wajib Pajak (X_2) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 18,3%.

Semakin menurun tingkat Sikap Wajib Pajak, maka semakin menurun pula Kepatuhan Pajak.

c) Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak Y

Nilai koefisien Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) adalah sebesar 0,524 atau 52,4%. Berarti bahwa Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y) yaitu sebesar 52,4%. Artinya jika ada penurunan Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 52,4%. Begitu juga sebaliknya, jika ada kenaikan Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) sebesar 100%, maka Kepatuhan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 52,4%. Semakin menurun tingkat Pelaksanaan Sanksi Denda, maka semakin menurun pula Kepatuhan Pajak.

6) Uji Hipotesis

a. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan/Bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (uji F). Untuk menjawab permasalahan seberapa besar sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak, dan pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara bersama-sama pada PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang, maka hasilnya diuji dengan

menggunakan *Analysis of Varians* (ANOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.15
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.038	3	2.679	18.735	.000 ^a
Residual	6.579	46	.143		
Total	14.617	49			

a. Predictors: (Constant), Pelaksanaan Sanksi Denda, Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.15 di atas, hasil pengujian hipotesis secara simultan (bersama) diketahui F_{hitung} untuk variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 18,735. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sampel sebanyak 50 atau $N = 50$, $K = 3$ maka diperoleh $df = N - K - 1 = 46$ yang menghasilkan F_{tabel} sebesar 2,79. Nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} yaitu $18,735 > 2,79$ sehingga berarti hipotesis H_0 ditolak.

Kesimpulannya bahwa Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 18,735%. Berdasarkan kriteria pengujian F_{sig} dan nilai α yaitu $0,000 < 0,05$ maka hipotesis H_a diterima atau menandakan adanya signifikan.

Sehingga variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel independen yaitu Kepatuhan Pajak dengan studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial/Individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap variabel dependen Kepatuhan Pajak studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang. Adapun hasil dari pengujian Uji t adalah sebagai berikut:

Tabel IV.16
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.534	.489		3.137	.003
Sosialisasi Perpajakan	-.017	.106	-.018	-.160	.873
Sikap Wajib Pajak	.183	.101	.219	1.815	.076
Pelaksanaan Sanksi Denda	.524	.097	.619	5.429	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.16, hasil uji hipotesis secara regresi diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel independen Sosialisasi Perpajakan sebesar -0,160, nilai t_{hitung} untuk variabel independen Sikap Wajib Pajak sebesar 1,815, dan nilai t_{hitung} untuk variabel independen Pelaksanaan Sanksi Denda sebesar 5,429. Berdasarkan kriteria pengujian ini, nilai t_{sig} untuk variabel independen Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,873, nilai t_{sig} untuk variabel independen Sikap Wajib Pajak sebesar 0,076 dan nilai t_{sig} untuk variabel independen Pelaksanaan Sanksi Denda sebesar 0,000.

a) Pengujian Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$. Hasil diperoleh untuk t tabel adalah 2,012 sedangkan t hitung adalah -0,160, sehingga dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $<$ t tabel. Karena signifikansi $0,873 > 0,05$ yang berarti hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

b) Pengujian Variabel Sikap Wajib Pajak (X_2)

Dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$. Hasil diperoleh untuk t tabel adalah 2,012 sedangkan t hitung adalah 1,815, sehingga dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $<$ t tabel. Karena

signifikansi $0,076 > 0,05$ yang berarti hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sikap Wajib Pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

c) Pengujian Variabel Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3)

Dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $50-3-1 = 46$. Hasil diperoleh untuk t tabel adalah 2,012 sedangkan t hitung adalah 5,429, sehingga dari hasil tersebut terlihat bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Karena signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pelaksanaan Sanksi Denda (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial atau uji t bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_{02a} diterima dan H_{a2a} ditolak.

Sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak diharapkan akan membawa dampak yang baik kepada masyarakat sehingga berkontribusi pada peningkatan jumlah wajib pajak tiap tahunnya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang

pribadi terhadap pajak yang nantinya memberikan lebih banyak suntikan dana kepada negara dari masyarakat dari sektor publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Dudi (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan *Help Desk* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh sehingga perlu di evaluasi kembali. Hal ini sama dengan penelitian penulis secara parsial bahwa variabel independen Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial atau uji t bahwa variabel Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_{02b} diterima dan H_{a2b} ditolak.

Sikap adalah pernyataan evaluative, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa, sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Senen). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama dengan penelitian penulis secara parsial bahwa variabel independen Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial atau uji t bahwa variabel Pelaksanaan Sanksi Denda berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_{02c} ditolak dan H_{a2c} diterima.

Pelaksanaan Sanksi Denda adalah untuk menunjukkan pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Elva (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Ini menandakan semakin tegas dan berat sanksi perpajakannya, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Madiun. Hal ini sama dengan penelitian penulis secara parsial bahwa variabel independen pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pajak dengan studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di PT. Pertamina (Persero) *Marketing Operation Region II* Palembang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Keseluruhan sampel yang digunakan sebanyak 50 (lima puluh) responden. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Secara parsial (uji t) Variabel yang berpengaruh dalam menjelaskan kepatuhan pajak adalah pelaksanaan sanksi denda. Variabel yang tidak berpengaruh dalam menjelaskan kepatuhan pajak adalah sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak. Sedangkan secara simultan (uji F) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sosialisasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pajak.

B. Saran

Dari permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, saran dari penulis ialah:

1. Agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan pajak dan membayar pajak sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel.